

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269) teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Agency theory* menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak (*loosely defined*) antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan *agency* muncul ketika satu atau lebih individu, yang disebut pelaku (*principals*), memperkerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut *agent* untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen.

Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal* dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Hubungan keagenan timbul pada saat pemegang saham atau pemilik perusahaan (*principal*) menunjuk manajer (*agent*) sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan. Manajemen keuangan mempunyai tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, namun adakalanya

manajemen tidak mampu mencapai tujuan tersebut sehingga menimbulkan suatu masalah yang disebut sebagai masalah keagenan (*Agency problem*).

*Agency problem* timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik kepentingan mendasari adanya biaya keagenan, dengan asumsi rasionalitas ekonomi dimana orang akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum pemenuhan kepentingan orang lain. Demikian juga halnya dalam hubungan prinsipal dan agen. Prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya (Febrianty, 2011).

Konflik kepentingan tersebut mendasari adanya biaya keagenan atau agensi. Biaya agensi dapat meningkat karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham, manajer dan kreditor. Cooke (1989) berpendapat bahwa biaya agensi meningkat saat pemegang saham menjadi semakin jauh dari manajemen. Karena perusahaan yang tidak listing cenderung memiliki jumlah pemegang saham yang lebih kecil, maka biaya agensi diperkirakan lebih rendah dari pada untuk perusahaan yang listing. Sebaliknya, berkenaan dengan semakin besar pemisahan antara pemilik dan manajer, maka perusahaan yang listing lebih besar kemungkinannya untuk mengucurkan biaya agensi yang lebih tinggi, misalnya biaya pengawasan. Biaya-biaya ini bisa dikurangi melalui pengungkapan sukarela tambahan informasi perusahaan. Indikasi *audit delay* bagi pihak perusahaan emiten adalah diperlukannya biaya agensi untuk mengembalikan kepercayaan

investor seperti biaya untuk pengungkapan informasi tambahan, kaitannya adalah semakin panjang audit delay dan semakin sering audit delay terjadi maka akan semakin besar pula biaya agensi yang harus dikeluarkan.

### 2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Gumanti (2009:4) teori sinyal (*signaling theory*) merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan.

Manajemen sebagai pihak yang mengetahui informasi internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan secara lengkap dan akurat, berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pihak luar yang membutuhkan. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten. Manajer memberikan informasi kepada pasar melalui publikasi laporan keuangan. Umumnya pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal *good*

*news* atau *bad news*, kedua indikasi sinyal tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Maka, sinyal dari perusahaan sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan (Febrianty, 2011).

### 2.1.3 Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2009:1) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009:3). Para pengguna informasi tersebut diantaranya adalah:

- a. Investor, penanam modal membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi. Mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
- b. Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

- c. Pemberi pinjaman, pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya, pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- e. Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.
- f. Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan.
- g. Masyarakat, laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan empat karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan (IAI, 2009:5) diantaranya adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Guna mencapai

maksud ini, diasumsikan pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

## 2. Relevan

Informasi disebut relevan ketika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Agar relevan, informasi harus dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang (*predictive value*), menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya (*feedback value*), juga harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*).

## 3. Keandalan

Informasi disebut andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang dapat disajikan secara wajar.

## 4. Dapat dibandingkan

Identifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan laporan keuangan perusahaan antar periode hendaknya dapat diperbandingkan oleh pemakai. Dengan demikian pemakai dapat memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan

akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan dengan kandungan informasi dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan mempunyai daya banding. Karakteristik relevan disini berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan secara tepat waktu. Penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan akan berakibat pada hilangnya relevansi laporan keuangan (SAK, 2009:8).

#### **2.1.4 Audit dan Standar Auditing**

Terdapat banyak pengertian tentang auditing, diantaranya adalah:

Pengertian auditing menurut Agoes (2012:4)

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Pengertian auditing menurut Arens (2006:4) definisi auditing adalah sebagai berikut :

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan beberapa elemen fundamental dalam auditing, yaitu (1) untuk melakukan audit, harus tersedia

informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. (2) mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. (3) auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan. (4) auditor harus kompeten dan independen untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti juga mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan.

Akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit (Arens, 2006:17), yaitu :

1. Audit operasional, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, auditor juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
2. Audit ketaatan (*compliance audit*), dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.
3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip yang berlaku umum (GAAP).



Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:117) tahap audit laporan keuangan meliputi: (1) Penerimaan penugasan audit; (2) Perencanaan audit; (3) Pelaksanaan pengujian audit; (4) Pelaporan audit.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai keempat proses audit tersebut:

#### 1. Penerimaan Penugasan Audit

Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit dari klien. Enam langkah yang perlu ditempuh oleh auditor di dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan audit dari calon kliennya yaitu;

- a. Mengevaluasi integritas manajemen
- b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa
- c. Menilai kompetensi untuk melakukan audit
- d. Mengevaluasi independensi
- e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan (*due care*)
- f. Membuat surat penugasan audit (*engagement letter*).

#### 2. Perencanaan Audit

Setelah menerima penugasan audit dari klien, langkah berikutnya adalah perencanaan audit. Ada delapan tahap yang harus ditempuh, yaitu:

- a. Memahami bisnis dan industri klien
- b. Melaksanakan prosedur analitis
- c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
- d. Mempertimbangkan risiko bawaan

- e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal dan jangka waktu penugasan klien berupa audit tahun pertama
- f. Mengembangkan strategi awal terhadap asersi signifikan
- g. Mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban legal klien
- h. Memahami struktur pengendalian intern klien

### 3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Secara garis besar pengujian audit dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pengujian analitis (*analytical tests*)
- b. Pengujian pengendalian (*tests of control*)
- c. Pengujian substantif (*substantive test*)

### 4. Pelaporan Audit

Langkah akhir dari suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit. Oleh karena itu, auditor harus menyusun laporan keuangan auditan (*audited financial statement*), penjelasan laporan keuangan (*notes to financial statement*) dan pernyataan pendapat auditor.

Setelah menyelesaikan keseluruhan penugasan audit, hasil temuan-temuan audit harus dikomunikasikan kepada klien dalam bentuk laporan audit. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan

kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Auditor memberikan pendapat dalam laporan audit sesuai dengan hasil temuan audit, ada 4 jenis pendapat yang dikeluarkan akuntan dalam laporan auditnya (Arens, 2006:70), yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified opinion*), auditor mengeluarkan pendapat *Unqualified opinion* bila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Semua unsur laporan keuangan sudah tercakup dalam pemeriksaan;
  - b. Semua standar audit sudah dilaksanakan;
  - c. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk memenuhi seluruh standar audit;
  - d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan telah diterapkan secara konsisten;
  - e. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan.
2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified opinion*), auditor memberikan pendapat *Qualified opinion*, apabila terjadi kondisi seperti dibawah ini, diantaranya :
  - a. Adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau

- b. Laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan Standar Keuangan.
3. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse of opinion*), auditor memberikan pendapat *Adverse of opinion*, apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan (tidak sesuai dengan kriteria dari GAAP/PSAK).
4. Menolak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*) diterbitkan apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut Kode Perilaku Profesional antara auditor dengan kliennya.

Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Pedoman yang paling luas yang tersedia adalah 10 standar auditing yang berlaku umum (*generally accepted auditing standards / GAAS*) yang dikembangkan oleh AICPA. Standar auditing tersebut dibagi menjadi tiga kategori (Arens, 2006:43), yaitu :

1. Standar Umum, yaitu :
  - a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
  - b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.

c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

2. Standar Pekerjaan Lapangan, yaitu :

a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.

b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu, serta bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan, yaitu :

a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.

c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.

- d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor.

#### **2.1.5 Audit Delay**

Pemenuhan tahapan audit laporan keuangan yang meliputi: (1) Penerimaan penugasan audit; (2) Perencanaan audit; (3) Pelaksanaan pengujian audit; (4) Pelaporan audit (Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998:117) yang sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang memadai dan mendapatkan pemahaman atau bukti yang cukup memadai, dapat menyebabkan waktu untuk penyelesaian audit menjadi relatif lama, akibatnya akuntan publik dapat menunda untuk mempublikasikan laporan auditnya. Penundaan dalam publikasi laporan keuangan auditan tersebut dinamakan *audit delay*.

*Audit Delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. *Audit delay* merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit

(Kartika, 2009). *Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan. Berdasarkan paparan di atas, salah satu pengguna informasi dalam laporan keuangan adalah investor, penanam modal atau investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

Menurut surat keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-346/BL/2011 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, setiap emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. Artinya, investor masih dapat memberikan toleransi maksimal 90 hari setelah tahun buku berakhir kepada perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan auditan. Bila publikasi laporan keuangan auditan melebihi batas maksimal tersebut maka dapat mengganggu keputusan investor atau pengguna informasi lainnya dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang memicu penulis untuk melakukan pemahaman dan pengujian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, dalam penelitian ini penulis menguji pengaruh faktor ukuran perusahaan, probabilitas kebangkrutan, jumlah komite audit, kepemilikan publik dan ROA terhadap *audit delay*.

Adapun teori mengenai faktor-faktor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

## 2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*

### 2.1.6.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor. Kep-11/PM/1997 tanggal 30 April 1997, perusahaan kecil atau menengah adalah badan hukum yang:

- 1) Didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) Bukan merupakan Afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan Perusahaan Menengah atau Kecil; dan
- 3) Bukan merupakan Reksa Dana.

Sedangkan perusahaan besar merupakan badan hukum yang memiliki total aset lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terdapat dua logika yang mendasari hubungan ukuran perusahaan dengan *audit delay*. Pertama, semakin besar perusahaan maka semakin lama *audit delay* yang dialami perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kompleksitas audit yang dilakukan auditor. Perusahaan yang besar cenderung menghasilkan banyak transaksi, sehingga jumlah sampel yang harus diambilpun menjadi lebih banyak dan prosedur audit yang dilakukan juga semakin luas. Hasil penelitian Febrianty (2011), Isbangun (2014), Putri (2012) menguatkan teori ini. Arah hubungan yang positif ini juga ditemukan dalam hasil penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014)



namun penelitian mereka tidak dapat membuktikan adanya pengaruh yang signifikan.

Kedua, perusahaan besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik dibanding perusahaan kecil, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki total aset yang besar pula sehingga memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik juga memiliki sumber daya membayar biaya audit (*audit fees*) yang relatif tinggi dan cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk menyajikan laporan keuangannya lebih cepat. Hasil penelitian Kartika (2009) menguatkan teori ini. Namun demikian penelitian Rahardja (2012) tidak berhasil menemukan pengaruh yang signifikan, namun arah hubungannya sesuai dengan logika teori ini, yaitu negatif.

#### **2.1.6.2 Probabilitas Kebangkrutan**

Kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Kegagalan ekonomis berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu menutup biayanya sendiri. Kebangkrutan terjadi bila semua utang perusahaan melebihi nilai wajar aset totalnya. Dengan kata lain, perusahaan bernilai negatif atau berada dalam keadaan *actual insolvency*. Selain itu, dikenal juga istilah *technical insolvency* yaitu perusahaan

dianggap gagal bila tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Secara umum, penyebab kegagalan sebuah perusahaan adalah manajemen yang kurang kompeten. Tetapi penyebab umum kegagalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling terkait satu dengan lainnya. Pada prinsipnya, penyebab kegagalan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua (Rudianto, 2013:252), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor internal

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan akibat kurang kompetennya manajemen yang dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan, meliputi faktor keuangan maupun nonkeuangan. Kesalahan pengelolaan di bidang keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan
- b. Adanya "*current liabilities*" yang terlalu besar di atas "*current assets*"
- c. Lambatnya penagihan piutang atau banyaknya "*bad debts*" (piutang tak tertagih)
- d. Kesalahan dalam "*dividend policy*"
- e. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan.

Kesalahan pengelolaan di bidang nonkeuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan

- b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan
- c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan
- d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan
- e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan
- f. Kesalahan dalam kebijakan pembelian
- g. Kesalahan dalam kebijakan produksi
- h. Kesalahan dalam kebijakan pemasaran
- i. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan

## 2. Faktor eksternal

Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah perusahaan. Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan atau badan usaha, yaitu:

- a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun internasional
- b. Adanya persaingan yang ketat
- c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya
- d. Turunnya harga-harga dan sebagainya.

Menurut Rudianto (2013:253) kebangkrutan merupakan akumulasi dari kesalahan pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang. Karena itu, diperlukan alat untuk mendeteksi potensi kebangkrutan yang mungkin dialami perusahaan. Analisis kebangkrutan diperlukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Alat pendeteksi dini kebangkrutan dibutuhkan untuk melihat tanda-

tanda awal kebangkrutan. Alat pendeteksi kebangkrutan akan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut.

Informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Manajemen

Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan dihilangkan atau diminimalkan. Langkah pencegahan kebangkrutan merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisasi keuangan.

2. Pemberi pinjaman (kreditor)

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha berposisi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan-tidaknya pinjaman kepada perusahaan tersebut. Pada langkah berikutnya, informasi tersebut berguna untuk memonitor pinjaman yang telah diberikan.

3. Investor

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka perusahaan calon investor itu dapat memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

#### 4. Pemerintah

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintahan bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintahan mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.

#### 5. Akuntan publik

Akuntan publik perlu menilai potensi keberlangsungan hidup badan usaha yang sedang diauditnya, karena akuntan akan menilai kemampuan *going concern* perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa alat yang dihasilkan dari berbagai penelitian untuk mendeteksi kebangkrutan, seperti Altman Z-Score, Springate Model, Zmijewski Model. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus dari hasil penelitian Altman yang disebut sebagai *Z score*. Altman telah menghasilkan beberapa rumus dalam setiap perkembangan penelitiannya (Rudianto, 2013:254).

Rumus *Z-Score* pertama dihasilkan Altman pada tahun 1968. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public*. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Sumber: Rudianto (2013:254)

Keterangan:

$X_1$  = Modal kerja/Total aset

$X_2$  = Laba ditahan/Total aset

$X_3$  = EBIT/Total aset

$X_4$  = Nilai pasar saham/Total utang

$X_5$  = Penjualan/Total aset

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

$Z > 2,99$	= Zona aman
$1,81 < Z < 2,99$	= Zona Abu-abu
$Z < 1,81$	= Zona Berbahaya

Model kebangkrutan Altman memiliki sejumlah keterbatasan yang menjadi hambatan untuk diaplikasikan pada perusahaan di berbagai belahan dunia dengan kondisi yang berbeda. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

1. Dalam membentuk model ini hanya memasukkan perusahaan manufaktur yang *go public* saja. Sedangkan perusahaan dari jenis lain memiliki hubungan yang berbeda antara total modal kerja dan variabel lain yang digunakan dalam analisis rasio.
2. Penelitian yang dilakukan Altman pada tahun 1946 sampai 1965 tentu saja berbeda dengan kondisi sekarang, sehingga proporsi untuk setiap variabel sudah kurang tepat lagi untuk digunakan.

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak *go public*. Karena itu rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak *go public*, sebagai berikut:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Sumber: Rudianto (2013:256)

Keterangan:

$X_1$  = Modal kerja/Total aset

$X_2$  = Laba ditahan/Total aset

$X_3$  = EBIT/Total aset

$X_4$  = Nilai buku ekuitas/Nilai buku utang

$X_5$  = Penjualan/Total aset

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

$Z > 2,9$  = Zona aman

$1,23 < Z < 2,9$  = Zona Abu-abu

$Z < 1,23$  = Zona Berbahaya

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan, Altman tidak berhenti. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang *go public* maupun yang tidak. Rumus *Z-Score* terakhir ini merupakan rumus yang digunakan dalam penelitian ini, rumus tersebut yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang *go public* maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Sumber: Rudianto (2013:257)

Keterangan:

$X_1$  = Modal Kerja/Total Aset

$X_2$  = Laba ditahan/Total Aset

$X_3$  = EBIT/Total Aset

$X_4$  = Nilai Buku Ekuitas/Nilai Buku Utang

Dari hasil analisa model Altman, akan diperoleh nilai *Z-Score* yang dibagi dalam tiga tingkatan atau kategori, yaitu sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Titik Cut-off Model Altman**

<b>Kategori</b>	<b>Standar Penilaian</b>
Zona Aman	$Z > 2,60$
Zona Abu-abu	$1,1 < Z < 2,60$
Zona Berbahaya	$Z < 1,1$

Sumber: Rudianto (2013:258)

Dengan mengetahui nilai *Z-Score* suatu perusahaan, dapat diketahui kondisi badan usaha tersebut apakah mengalami masalah serius, atau menghadapi bahaya, atau masih dalam kondisi aman. Dengan analisis *Z-Score* ini juga manajemen dapat meramalkan prospek perusahaan di masa yang akan datang dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Semakin besar nilai “Z”, semakin besar pula jaminan akan kelangsungan hidup perusahaan dan semakin berkurang risiko kegagalan.

Berdasarkan hasil penelitian Setyahadi (2012) mengenai pengaruh probabilitas kebangkrutan terhadap *audit delay* diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000, ini mencerminkan bahwa faktor probabilitas kebangkrutan layak dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat dipertimbangkan oleh auditor sebagai pertimbangan sebelum memberikan opini audit perusahaan. Perusahaan yang diduga memiliki probabilitas kebangkrutan yang lebih besar yang ditunjukkan dengan *Z-score* yang kecil atau dibawah 1,1, cenderung akan mengalami *audit delay* yang lebih

panjang. Hal ini disebabkan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, cenderung akan terjadi penundaan pelaporan keuangan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan, karena auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit dan juga auditor memerlukan data tambahan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut.

### 2.1.6.3 Komite Audit

Menurut surat keputusan BAPEPAM nomor Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Setiap perusahaan *go public* di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik, yang diketuai oleh komisaris independen. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut Arens (2006:112) komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Sarbanes-Oxley Act mewajibkan semua anggota komite audit bersikap independen, setidaknya ada pakar keuangan paling sedikit satu orang dalam komite audit perusahaan.

Sarbanes-Oxley Act selanjutnya mensyaratkan komite audit perusahaan publik bertanggung jawab atas penunjukan, kompensasi, dan pengawasan atas pekerjaan auditor. Komite audit harus menyetujui terlebih dahulu semua jasa audit dan nonaudit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidaksepakatan yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor. Auditor bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan semua hal yang signifikan yang dapat diidentifikasi selama audit kepada komite audit (Arens, 2006:112b).

Ketentuan ini meningkatkan independensi dan peran komite audit. persyaratan tersebut mempertinggi independensi auditor dengan secara efektif membuat komite audit menjadi klien bagi perusahaan publik, bukannya manajemen perusahaan (Arens, 2006:112c).

Berdasarkan peraturan BAPEPAM nomor Kep-643/BL/2012, setiap perusahaan *go public* diwajibkan membentuk komite audit yang beranggotakan minimal 3 orang. Hasil penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*, penambahan anggota komite audit akan cenderung meningkatkan proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan standar yang berlaku umum sehingga waktu yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan audit menjadi lebih pendek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Haryani dan Wiratmaja (2014) terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit dengan *audit delay*. Semakin banyak anggota komite audit maka *audit delay* yang dialami semakin

pendek, penambahan anggota komite audit akan cenderung meningkatkan proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan standar yang berlaku umum sehingga waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit menjadi lebih pendek.

#### **2.1.6.4 Kepemilikan Publik**

Kepemilikan publik adalah prosentase kepemilikan saham perusahaan publik oleh masyarakat umum. Publik merupakan individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Besarnya prosentase kepemilikan publik dapat dilihat di laporan catatan atas laporan keuangan yang diakses dari situs website BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Pemilik perusahaan dari pihak luar atau pemegang saham berkepentingan untuk mengetahui tingkat kembalian atas investasi mereka. Oleh karenanya mereka membutuhkan informasi yang membantu mereka untuk memutuskan tindakan untuk membeli atau menjual saham-saham suatu perusahaan. Disamping itu pemilik perusahaan dari pihak luar juga ingin mengetahui kemampuan perseroan untuk membayar dividen (Ang, 2003).

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar untuk menekan manajemen agar dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena pihak luar mampu mempengaruhi perusahaan melalui media massa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai

suara publik atau masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya (Saleh, 2004). Hasil penelitian Haryani & Wiratmaja (2014) memperkuat teori ini, yaitu terdapat pengaruh yang negatif antara presentase kepemilikan publik dengan *audit delay*. Kepemilikan saham oleh pihak luar menyebabkan gerak perusahaan dalam melakukan pengelolaan menjadi terbatas karena adanya tekanan yang diberikan oleh pasar terkait dengan peningkatan kinerja dari perusahaan tersebut serta ketaatannya pada peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tekanan yang diberikan oleh pasar ini memberikan kecenderungan pada manajemen untuk mempercepat penyampaian laporan keuangan kepada publik, sehingga perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung lebih cepat dalam publikasi laporan keuangannya.

#### **2.1.6.5 Return On Asset**

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Untuk dapat menilai kinerja manajemen dalam periode pelaporan keuangan tersebut, harus dilakukan perbandingan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Perbandingan tersebut dikenal dengan nama analisis rasio keuangan (Kasmir, 2012:104).

Menurut David (2009:206) rasio keuangan dihitung dari laporan laba rugi dan neraca suatu perusahaan. Menghitung rasio keuangan adalah seperti mengambil gambar karena hasilnya mencerminkan situasi di satu titik tertentu. Rasio-rasio keuangan utama dapat dikelompokkan menjadi lima jenis yaitu: (1) Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*), (2) Rasio Pengungkit (*leverage ratio*), (3) Rasio Aktivitas (*activity ratio*), (4) Rasio Profitabilitas (*probability ratio*), (5) Rasio pertumbuhan (*growth ratio*).

1. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*) mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua yaitu rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).
2. Rasio pengungkit (*leverage ratio*) mengukur sejauh mana sebuah perusahaan didanai oleh utang. Rasio pengungkit dibagi menjadi empat macam yaitu: Rasio utang terhadap total aset (*debt to total assets ratio*), rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (*long term debt to equity ratio*), rasio kelipatan bunga yang dapat dibayarkan (*times interest earned ratio*).
3. Rasio Aktivitas (*activity ratio*) mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan sumber dayanya, rasio aktivitas dibagi menjadi lima macam yaitu, perputaran persediaan (*inventory turnover*), perputaran aset tetap (*fixed assets turnover*), perputaran total aset (*total assets turnover*), perputaran piutang usaha (*account receivable turnover*), waktu penagihan rata-rata (*average collection period*).

4. Rasio profitabilitas (*probability ratio*) mengukur keefektifan manajemen secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan oleh pengembalian (*return*) yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 7 macam yaitu margin laba kotor (*gross profit margin*), margin laba operasi (*operating profit margin*), margin laba bersih (*net profit margin*), pengembalian atas total aset (*return on total assets-ROA*), pengembalian atas ekuitas pemegang saham, laba per saham (*earning per share-EPS*), rasio harga laba (*price earning ratio*).
5. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan industri. Rasio pertumbuhan dibagi menjadi empat macam yaitu, penjualan (*sales*), laba bersih (*net income*), laba per saham (*earning per share-EPS*), dividen per saham (*dividends per share*).

Dari lima rasio keuangan di atas, hanya rasio profitabilitas yang dijadikan sebagai variabel dalam penelitian, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan setiap perusahaan (Kasmir, 2012:196).

Menurut Kasmir (2012:114) rasio profitabilitas dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Para investor di pasar



modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan profit, hal ini menjadi daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan ROA untuk menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan. ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas total aset yang digunakan dalam perusahaan. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset (Kasmir, 2012:202).

Menurut Wild (2005:110), analisis profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan kreditor. Bagi investor ekuitas, laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ROA maka akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi rendahnya *Return On Asset* (ROA) akan mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk menyampaikan *good news* secepatnya kepada publik. Menurut hasil penelitian Isbangun (2014) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara profitabilitas perusahaan dengan *audit delay*. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, tingkat profitabilitas yang rendah ditengarai berpengaruh terhadap *audit delay*.

Secara sistematis *Return On Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2008:202):

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax} \times 100 \%}{\text{Total Assets}}$$

Sumber: Kasmir (2008:202)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Febrianty, (2011) meneliti hubungan *audit delay* dengan beberapa variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, tingkat leverage, kualitas KAP. Dengan menggunakan 21 sampel perusahaan dikalikan periode tahun pengamatan (3 tahun, tahun 2007-2009) sehingga didapatkan jumlah data sebanyak 63. Variabel yang berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah ukuran perusahaan dan tingkat leverage.

Kartika (2009), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2005, dengan sampel 13 perusahaan yaitu ASII, BBCA, GGRM, GJTL, INDF, INTP, ISAT, KLBF, PNBK, RALS, TINS, TLKM, UNTR. Ke-13 perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, laba rugi operasi, opini auditor, profitabilitas, dan reputasi auditor. Variabel ukuran perusahaan, laba rugi operasi, mempunyai pengaruh yang negatif

dan signifikan terhadap *audit delay* perusahaan. Opini dari auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit delay* perusahaan. Faktor profit dan reputasi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay* perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) mengenai pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, penerapan *international financial reporting standards* dan kepemilikan publik terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2011. Dengan sampel yang digunakan berjumlah 112. Variabel yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah komite audit, dan kepemilikan publik. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan penerapan IFRS tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi, reputasi KAP, dan komite audit terhadap *audit delay*, dengan menggunakan penelitian *ex post facto*. Didapatkan kesimpulan bahwa *audit delay* yang terjadi adalah memiliki rata-rata sebesar 74,854 hari. *Audit delay* minimum yang terjadi adalah 37 hari dan maksimum 115 hari. Variabel yang berpengaruh terhadap keterlambatan audit hanya variabel *leverage*. Apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka resiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang *audit delay* akan lebih panjang. Sedangkan untuk variabel lainnya yaitu profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan komite audit tidak mempengaruhi *audit delay*.

Rahardja (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2008-2010, dan didapatkan jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 294 (selama 3 periode). Dengan variabel independennya yaitu kualitas auditor, opini auditor, ukuran perusahaan, jumlah komite audit, dan kompleksitas operasi perusahaan. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut : rata-rata *audit delay* perusahaan sampel di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010 adalah 75,56 hari. Hanya kualitas auditor dan opini auditor yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran perusahaan, jumlah komite audit dan kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Isbangun (2014) dengan jumlah sampel 45 perusahaan yang bergerak pada sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007 – 2011. Memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran auditor, berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hanya variabel Solvabilitas yang mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Putri (2012) melakukan penelitian dengan sampel penelitian 23 perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI dari tahun 2008 – 2011, sehingga totalnya 92 perusahaan. Didapatkan kesimpulan bahwa *Audit delay* yang terjadi pada perusahaan LQ 45 selama tahun 2008-2011, rata-rata 67.97 hari, nilai minimum sebesar 25 hari dan nilai maksimum sebesar 131 hari. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Perusahaan, Laba/Rugi Operasi, dan Opini Auditor terhadap *audit delay*.

Setyahadi melakukan penelitian mengenai pengaruh probabilitas kebangkrutan pada *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010 dengan data amatan sebanyak 772. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat signifikan dari pengaruh probabilitas kebangkrutan terhadap *audit delay* adalah 0,000 jauh dibawah 0,05, ini mencerminkan bahwa probabilitas kebangkrutan layak dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat dipertimbangkan oleh auditor sebagai pertimbangan sebelum memberikan opini audit perusahaan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan mengalami *audit delay* yang lebih panjang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Adriansyah dkk. (2012) meneliti pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2012 dengan jumlah sampel sebesar 93 perusahaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya solvabilitas yang berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Thohiri (2013) dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010 dengan jumlah sampel penelitian adalah sebesar 171 perusahaan, menunjukkan hasil bahwa hanya kualitas auditor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan, sedangkan *debt to equity*, profitabilitas, struktur kepemilikan, pergantian auditor, dan ukuran

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan.

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Independen	Hasil Penelitian	Sampel perusahaan
1	Febrianty (2011)	Ukuran Perusahaan, Tingkat <i>Leverage</i> , Kualitas KAP	Hanya ukuran perusahaan dan tingkat <i>leverage</i> yang berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>	63 sampel perusahaan perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009
2	Kartika (2009)	Ukuran Perusahaan, Laba Rugi Operasi, Opini Auditor, Profitabilitas, dan Reputasi Auditor	Ukuran perusahaan, laba rugi operasi, mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> perusahaan. Opini dari auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> perusahaan.	65 sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2001-2005
3	Haryani dan Wiratmaja (2014)	Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan <i>International Financial Reporting Standards</i> dan Kepemilikan Publik	Hanya komite audit, dan kepemilikan publik yang berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>	112 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011

4	Angruningrum dan Wirakusuma (2013)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP, dan Komite Audit	Rata-rata <i>audit delay</i> sebesar 74,854 hari. <i>Audit delay</i> minimum yang terjadi adalah 37 hari dan maksimum 115 hari. Hanya tingkat <i>leverage</i> yang berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>	194 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011
5	Rahardja (2012)	Kualitas Auditor, Opini Auditor, Ukuran Perusahaan, Jumlah Komite Audit, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan.	Rata-rata <i>audit delay</i> perusahaan sampel di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010 adalah 75,56 hari. Dan hanya kualitas auditor dan opini auditor yang berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> .	294 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010
6	Isbangun (2014)	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Auditor	Hanya ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran auditor, yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan solvabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i>	45 sampel perusahaan sektor perdagangan barang dan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011

7	Putri (2012)	Ukuran Perusahaan, Laba/Rugi Operasi, dan Opini Auditor	Rata-rata <i>audit delay</i> 67.97 hari, nilai minimum sebesar 25 hari dan nilai maksimum sebesar 131 hari. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Perusahaan, Laba/Rugi Operasi, dan Opini Auditor terhadap <i>audit delay</i>	92 sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011
8	Setyahadi (2012)	Probabilitas Kebangkrutan	Rata-rata <i>audit delay</i> perusahaan di Indonesia adalah 76,27 hari yang merupakan <i>cut off</i> waktu selesainya pekerjaan lapangan auditor, <i>audit delay</i> dipengaruhi oleh probabilitas kebangkrutan.	772 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010
9	Adriansyah dkk. (2012)	Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan	Hanya Solvabilitas yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	93 sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012
10	Putra dan Thohiri (2013)	Kualitas Auditor, <i>Debt To Equity</i> , Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, Pergantian Auditor, dan Ukuran Perusahaan	Hanya kualitas auditor yang berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.	171 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap tingkat relevansi dan tingkat kepastian keputusan informasi, karena laporan keuangan auditan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Lamanya auditor dalam mengerjakan auditnya (*audit delay*) dapat mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan. Panjang pendeknya jangka waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah ukuran perusahaan, probabilitas kebangkrutan, komite audit, kepemilikan publik dan ROA.

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, dan hasil penelitiannya beragam. Hasil penelitian dari para peneliti yang memberikan kesimpulan mengenai adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* diantaranya adalah Febrianty (2011), Kartika (2009), Isbangun (2011), Putri (2012). Sedangkan peneliti yang berkesimpulan bahwa terdapat pengaruh namun tidak signifikan antara ukuran perusahaan dengan *audit delay* diantaranya adalah Haryani dan Wiratmaja (2014), Rahardja (2012), Putra dan Thohiri (2013) serta Adriansyah dkk. (2012). Peneliti yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara probabilitas kebangkrutan terhadap *audit delay* yaitu Setyahadi (2012). Haryani dan Wiratmaja (2014) menyimpulkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*, namun simpulan penelitian tersebut berbanding

terbalik dengan hasil penelitian dari Angruningrum dan Wirakusuma (2013), dan Rahardja (2012).

Hasil penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay*, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Putra dan Thohiri (2013) serta Adriansyah dkk. (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan publikasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Isbangun (2014) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap *audit delay*. Namun, hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009), Angruningrum dan Wirakusuma (2013), Putra dan Thohiri (2013) juga Adriansyah dkk. (2012) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap *audit delay*.

**Tabel 2.3**  
**Tabel Perbandingan Hasil Penelitian**

Variabel bebas	Hasil penelitian	
	Berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>	Berpengaruh namun tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i>
<b>Ukuran Perusahaan</b>	Febrianty (2011), Kartika (2009), Isbangun (2014), Putri (2012)	Rahardja (2012), Haryani dan Wiratmaja (2014), Putra dan Thohiri (2013), Adriansyah dkk. (2012)

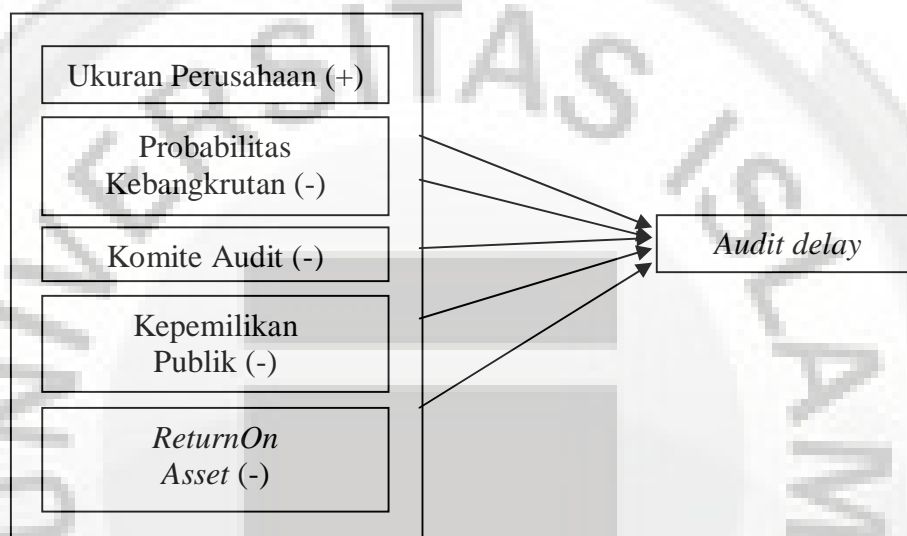
<b>Probabilitas Kebangkrutan</b>	Setyahadi (2012)	
<b>Komite Audit</b>	Haryani dan Wiratmaja (2014)	Angruningrum dan Wirakusuma (2013), Rahardja (2012)
<b>Kepemilikan Publik</b>	Haryani dan Wiratmaja (2014)	Putra dan Thohiri (2013), Adriansyah dkk. (2012)
<b>ROA</b>	Isbangun (2014)	Kartika (2009), Angruningrum dan Wirakusuma (2013), Putri (2012), Putra dan Thohiri (2013), Adriansyah dkk. (2012)

Sumber: Data diolah

Keberagaman hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* merupakan fenomena *research gap*, adanya perbedaan variabel yang diteliti, waktu pengamatan dan sampel penelitian juga merupakan hal yang menyebabkan masih terdapatnya *research gap* dalam penelitian. Berdasar pada keterbatasan pengkajian dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian kembali untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, dan menguji faktor-faktor dengan variabel bebas diantaranya adalah ukuran perusahaan, probabilitas

kebangkrutan, komite audit, kepemilikan publik dan ROA. Hubungan antar variabel akan diperlihatkan dalam model penelitian berikut:

**Gambar 2.1**  
**Model penelitian**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Terdapat dua logika yang mendasari hubungan ukuran perusahaan dengan *audit delay*. Pertama, semakin besar perusahaan maka semakin lama *audit delay* yang dialami perusahaan. Hasil penelitian Febrianty (2011), Isbangun (2014), Putri (2012) menguatkan teori ini. Arah hubungan yang positif ini juga ditemukan dalam hasil penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) namun penelitian tersebut tidak dapat membuktikan adanya pengaruh yang signifikan.

Kedua, perusahaan besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik dibanding perusahaan kecil, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki total aset yang besar pula sehingga memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik juga memiliki sumber daya membayar biaya audit (*audit fees*) yang relatif tinggi dan cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Hasil penelitian Kartika (2009) menguatkan teori ini.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

**H1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara ukuran perusahaan terhadap *audit delay***

#### **2.4.2 Pengaruh Probabilitas Perusahaan Terhadap *Audit Delay***

Menurut Rudianto (2013:252) kebangkrutan adalah kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Kebangkrutan terjadi bila semua utang perusahaan melebihi nilai wajar aset totalnya. Probabilitas kebangkrutan merupakan kemungkinan yang terjadi pada perusahaan dengan melakukan analisa terhadap kondisi perusahaan.

Berdasarkan hasil peneltian Setyahadi (2012) mengenai pengaruh probabilitas kebangkrutan terhadap *audit delay* diperoleh tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, ini mencerminkan bahwa probabilitas kebangkrutan layak dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat dipertimbangkan oleh auditor sebagai pertimbangan sebelum memberikan opini audit perusahaan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan mengalami *audit delay* yang lebih panjang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa, semakin kecil nilai Z-score akan mengakibatkan semakin besar probabilitas perusahaan mengalami *audit delay* yang lebih lama.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

**H2 : Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara probabilitas kebangkrutan terhadap *audit delay***

#### **2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Delay***

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam peraturan dari Bapepam-LK nomor Kep-643/BL/2012 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan *go public* di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik, yang diketuai oleh komisaris independen.

Semakin banyak anggota komite audit maka *audit delay* yang dialami semakin pendek, penambahan anggota komite audit akan cenderung meningkatkan proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai

dengan standar yang berlaku umum. Hasil penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013), serta Rahardja (2012) menguatkan teori ini.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

**H3 : Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara jumlah komite audit terhadap *audit delay***

#### **2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap *Audit Delay***

Kepemilikan publik adalah prosentase kepemilikan saham perusahaan publik oleh masyarakat umum. Perusahaan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hasil penelitian Haryani & Wiratmaja (2014) memperkuat teori ini, yaitu terdapat pengaruh yang negatif antara presentase kepemilikan publik dengan *audit delay*. Kepemilikan saham oleh pihak luar menyebabkan gerak perusahaan dalam melakukan pengelolaan menjadi terbatas karena adanya tekanan yang diberikan oleh pasar.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

**H4 : Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara prosentase kepemilikan publik terhadap *audit delay***

#### **2.4.5 Pengaruh *Return On Asset* Terhadap *Audit Delay***

Menurut Kasmir (2012:114) rasio profitabilitas dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Para investor di pasar

modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan profit, hal ini menjadi daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ROA untuk menganalisis tingkat profitabilitas, ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas total aset yang digunakan dalam perusahaan.

Tinggi rendahnya *Return On Asset* (ROA) akan mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk menyampaikan *good news* secepatnya kepada publik. Hasil penelitian Kartika (2009), serta Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menguatkan teori ini, hasil penelitian mereka membuktikan terdapat pengaruh negatif antara ROA dan *audit delay*.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

**H5 : Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara ROA terhadap *audit delay***